

Kajian *Wellbeing* dalam Perencanaan Kebijakan Pendidikan¹

Proyeksi Pendidikan Indonesia

Memasuki abad 21, Indonesia tidak terhindarkan memasuki agenda Tujuan Pembangunan Milenium (*Milenium Development Goals*), Masyarakat Ekonomi ASEAN, termasuk agenda pendidikan nasional.

Dalam skala global, dunia pendidikan tidak terhindarkan untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia abad 21, yang ditandai oleh 6 (enam) kecenderungan penting, yaitu (a) berlangsungnya revolusi digital yang semakin mengubah sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan pendidikan, (b) terjadinya integrasi di berbagai belahan dunia yang semakin intensif akibat internasionalisasi, globalisasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi, (c) berlangsungnya pendataran dunia (*the world is flat*) sebagai akibat teknologi komunikasi merubah dimensi-dimensi kehidupan manusia (d) cepatnya perubahan dunia yang tampak berlari, sehingga ruang dan waktu terasa menyempit dan ringkas, (e) tumbuhnya masyarakat dengan ciri padat pengetahuan (*knowledge society*), masyarakat informasi (*information society*), dan masyarakat jaringan (*network society*), (f) tumbuhnya fenomena masyarakat kreatif yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai modal penting untuk individu, perusahaan, dan masyarakat. Keenam hal tersebut telah

memunculkan tatanan, ukuran, dan kebutuhan baru yang berbeda dengan era sebelumnya, yang harus ditanggapi dengan cepat oleh dunia pendidikan nasional.

Sehubungan dengan itu, sendi-sendi pendidikan nasional Indonesia perlu ditransformasikan kembali untuk mempersiapkan keterampilan abad 21 sekaligus berpijak pada jati diri bangsa sehingga pendidikan nasional Indonesia perlu menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional berdampingan dengan potensi intelektual dan kesejahteraan (*wellbeing*) pada siswa. Hal ini sejalan dengan pokok pikiran bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara bahwa landasan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya (kultural dan nasional) dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.

Tercapainya *wellbeing* pada kehidupan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah belum dipertimbangkan sebagai elemen kunci dalam dokumen-dokumen negara yang terkait bidang pendidikan.

¹Ifa H. Misbach, Edi Subkhan, dan Erwan Nizwarudin (2018)

Telaah Dokumen Pendidikan

Sebagai bahan telaah dokumen pendidikan dapat dilihat, yaitu: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap I 2005-2009, RPJMN tahap II 2010-2014, dan hingga sekarang (2018) RPJMN tahap III 2015-2019, (3) Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, (4) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019.

Dalam dokumen RPPNJP terdapat visi pendidikan tahun 2025 yaitu "Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kami/Insan Paripurna)". Artinya, Indonesia sudah memiliki visi pendidikan yang jelas, berdasarkan versi RPPNJP juga terdapat dalam dokumen-dokumen Renstra Kemdikbud. Jika dianalisa pada dokumen RPJPN 2005-2025 memang tidak terdapat visi khusus mengenai pendidikan melainkan menjadi bagian dari payung bahasan "Pengembangan sumber daya manusia (SDM)", dengan visi "Terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia". Jika ditambah dengan fungsi dan tujuan pendidikan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka sebenarnya pendidikan kita sudah punya arah yang jelas².

Yang selalu menjadi persoalan di lapangan adalah apakah fungsi dan tujuan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tersebut sudah dijadikan pertimbangan filosofis dalam menurunkan kebijakan pendidikan oleh Kemdikbud, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di tataran yang lebih teknis-operasional dalam merumuskan undang-undang dan ketentuan perundang-undangan termasuk sampai menurunkan ke butir indikator pendidikan?

Telaah kritis dalam upaya penjabaran RPJPN, visi pendidikan menjadi tidak jernih disebutkan dengan jelas karena dimasukkan sebagai bagian tersirat dari visi pengembangan SDM, dimana visi SDM ini menjadi meluas ke segala bidang, yang belum terjahit dengan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3, dimana keberhasilan mendidik generasi muda tidak hanya menghasilkan SDM untuk pembangunan ekonomi, melainkan juga berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini rupanya yang membuat visi pendidikan dalam RPJPN agak sulit diturunkan secara jelas ke dalam RPJMN. Khususnya untuk telaah RPJMN, tidak terdapat visi pendidikan yang disebutkan tersendiri, baik di dokumen RPJMN tahap I, II, maupun III.

Pada dokumen RPJMN tahap I, 2005-2009, bahasan pendidikan terdapat pada uraian Bab 27 mengenai peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Beberapa programnya dapat dikategorisasikan berdasarkan jenjang pendidikan, jenis pendidikan, dan hal yang memengaruhinya secara langsung³. Uraian mengenai pendidikan dalam bab tersebut tidak didahului oleh visi, melainkan analisis terhadap permasalahan yang ada, uraian sasaran pembangunan pendidikan, arah kebijakan, dan program-program pembangunan.

Uraian mengenai program-program pembangunan pendidikan dalam RPJMN tahap I sudah operasional dan lengkap. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), misalnya pengembangan kurikulum PAUD. Pada jenjang pendidikan dasar fokusnya pada program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun, wujudnya meliputi (1) pemenuhan sarana, (2) biaya operasional (*block grant* dan swadaya), (3) penyediaan beragam alternatif layanan pendidikan, (4) menarik kembali anak putus sekolah, (5) pengembangan kurikulum lokal dan nasional, penyediaan materi, pembinaan bakat, minat, dan kreativitas siswa,

²Edi Subkhan (2018)

³Lebih lengkap baca Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN tahun 2004-2009

(7) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan, pembiayaan, dan pengelolaan, dan kesadaran bahwa pendidikan adalah hak dasar laki-laki maupun perempuan. Hal yang sama juga terdapat pada RPJM tahap II 2010-2014, yang dilegalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014. Pada bagian prioritas pendidikan (Buku 1 Prioritas Nasional, hal 1-52). Juga dalam dokumen RPJM III (2015-2019) pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM nasional 2015-2019, pada bab 2 mengenai pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama. Terdapat 27 (duapuluh tujuh) program dari Wajar 9 tahun hingga peningkatan keselarasan perencanaan kebijakan berdasarkan daya yang sah dan handal. Pada dokumen RPPNJP 2005-2025 juga tidak terdapat visi pembangunan pendidikan per tahap (tahap I 2005, tahap II 2010-2014, tahap III 2015-2019, tahap IV 2020-2024), yang ada langsung visi pendidikan jangka panjang 2005-2025.

Dokumen yang justru terdapat visi pendidikan per tahap adalah Renstra Kemdikbud. Pada Renstra Kemdikbud 2005-2009, arahnya yaitu "Peningkatan kapasitas dan modernisasi", visinya "Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia yang cerdas komprehensif dan kompetitif". Pada Renstra Kemdikbud 2010-2014 yaitu "Penguatan pelayanan", visinya "Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab".

Renstra Kemdikbud 2015-2019 yaitu "Daya saing regional", visinya "Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong". Meskipun visi pendidikan secara khusus tidak eksplisit muncul dalam RPJPN

dan PRJMN, namun terdapat dalam RPPNJP dan Renstra. Artinya, sebenarnya fungsi dan tujuan pendidikan yang telah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 sudah cukup.

Permasalahannya bukan soal visi utama pendidikan Indonesia tersebut, melainkan pada visi Renstra tiap periode/tahap. Apakah perumusan renstra tersebut betul-betul didasari oleh telaah mendalam terhadap visi pendidikan ideal sekaligus berpijak pada realitas pendidikan Indonesia yang kemudian apakah terjadi kesinambungan ke dalam program kerja dan sampai pada indikator butir pendidikan?

Hal tersebut patut dikaji lebih jauh, mengingat terlihat adanya "*miss-match*" antara arah pendidikan dalam dokumen Renstra ketika diturunkan ke dalam butir indikator pencapaian pendidikan. Seluruh dokumen Renstra nyaris tidak memiliki benang merah landasan filosofi pendidikan apa yang digunakan, konteks program kurang jelas mengacu pada arah dan misi pendidikan apa yang akan disasar. Seluruh dokumen Renstra tidak jelas membedakan mana indikator program dan mana indikator kegiatan.

Yang paling krusial adalah nyaris semua indikator pendidikan belum mengukur mutu dan proses pendidikan meskipun visi Renstra Kemdikbud 2005-2009 dan 2014-2019? Visi 2005-2009 bertujuan menghasilkan insan Indonesia yang cerdas, komprehensif dan kompetitif, visi 2015-2019 bertujuan menghasilkan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong. Apakah berarti program Kemdikbud 2005-2009 tidak berupaya membangun lingkungan pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter? Apakah jika visi 2010-2014 fokus pada pelayanan prima, lantas tidak membangun lingkungan pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter? Apa pula beda insan Indonesia yang cerdas komprehensif dan kompetitif (visi 2005-2009) dan insan Indonesia yang cerdas dan beradab (visi 2010-2014)?

Pendidikan Karakter dan *Wellbeing*

Yang tampak pada semua dokumen langsung menghasilkan program kerja namun terjadi gap untuk mencapai visi-visi di atas yang sifatnya relatif abstrak hal ini terlihat dari semua indikator pendidikan seolah dipaksakan hanya berbasis pada prosentase (%) kuantitatif untuk mencapai target 100% dimana belum diukur apakah realistis atau tidak untuk tercapai. Contoh: APM/APK, % jumlah bahan buku ajar, % jumlah soal yang terstandar, % jumlah sekolah yang terakreditasi, dan lain-lain.

Oleh karena itu, untuk mengisi *gap* antara visi dan program perlu dijumpai oleh: (1) peta jalan (*road map*) yang jernih untuk jangka panjang (2005-2025), (2) adanya tahapan yang jelas dalam perumusan program kerja jangka menengah dan pendek dengan mengacu pada *road map* jangka panjang. Selama ini dokumen RPPNJP 2005-2025 belum memperlihatkan kejelasan arah dan prioritas serta tahapannya. Perumusan Renstra oleh Kemdikbud langsung dipandu oleh RPJPN dan PRJMN yang di dalamnya perlu dicermati lebih teliti lagi terutama di bagian-bagian butir indikator pendidikan yang belum jelas dalam mengukur mutu dan proses pendidikan.

Jika Renstra Kemdikbud 2015-2019 yaitu "Daya saing regional", dengan visi "Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong", maka pertanyaannya adalah:

Apakah program kerjanya sudah menelaah butir indikator pendidikan untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong?

Untuk mencapai visi Renstra Kemdikbud 2015-2019 yaitu "Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan berlandaskan gotong royong", tolak ukur keberhasilan pendidikan karakter yang dapat dijadikan acuan dalam menurunkan butir indikatornya adalah apakah penanaman nilai-nilai karakter pada siswa berujung mampu menjadikan kehidupan siswa mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya sehari-hari. Kesejahteraan disini mengacu pada *wellbeing* yang diamanatkan badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tujuan pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan siswa, membuat siswa memiliki *wisdom*, lebih berpengetahuan, beretika, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berpikir kritis, mampu dan termotivasi untuk menjadi pembelajar seumur hidup. *Wellbeing* adalah seperangkat keterampilan yang bisa diajarkan. Jadi perhatian utama untuk semua sekolah di seluruh dunia adalah bagaimana tujuan sekolah dapat mengembangkan rasa kesejahteraan siswa mereka, bukan hanya kinerja akademis yang seringkali tidak mampu menjawab persoalan hidup sehingga kelak mereka dapat berkembang dan makmur.

Implementasi *wellbeing* sasarannya dapat diterapkan dalam sekolah sebagai satuan pendidikan. Salah satu definisi *wellbeing* dalam konteks sekolah adalah '*predominantly positive mood, attitude, and relationships at school*' yang merujuk bahwa siswa yang mengalami hubungan positif dengan teman sebaya dan guru akan mengalami kepuasan dan dukungan sosial sehingga akan mengalami perasaan positif berada di sekolah yang berujung pada kesejahteraan optimal pada siswa.

Wellbeing dan Keterampilan Abad 21

Para ahli pendidikan dunia merujuk bahwa wellbeing adalah hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi perubahan abad 21 setelah melihat fakta-fakta kegagalan pendidikan di paruh abad 20 yang lebih banyak menitikberatkan pada kompetisi dan kemampuan intelektual yang tidak menyentuh kecakapan hidup yang bertumpu pada kesehatan mental dan emosional siswa. Sekitar 1/3 penduduk dunia berusia di bawah 18 tahun⁴, di negara manapun (kaya atau miskin) sekitar 10% atau 220 juta anak-anak dan remaja memiliki gangguan mental dengan diagnosa (terutama kecemasan, depresi atau gangguan perilaku)⁵. Lebih dari separuh anak-anak yang mengalami

penyakit mental di masa kecil juga akan menderita penyakit mental dalam kehidupan dewasa mereka⁶, hidup mereka cenderung hampa dan miskin, dimana kesehatan mental juga memengaruhi kesehatan fisik. Di negara-negara kaya hanya 25% anak-anak dengan masalah kesehatan mental yang menerima bantuan spesialis dan di negara-negara termiskin sangat sedikit yang memiliki akses ke bantuan apa pun⁷. Dari perspektif kemanusiaan, ini adalah kerugian besar dan berujung pada beban ekonomi. Di sebagian besar negara, penyakit mental mengurangi produk domestik bruto (PDB) lebih dari 5%⁸.

Pada awal abad ke-21, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi 4 pilar:

1. **Learning to live together.** Belajar hidup bersama. Pilar ini menyoroti pentingnya mengajarkan generasi muda mengenai nilai-nilai dan kompetensi sosial dan emosional yang menghubungkan orang-orang, membangun hubungan, memperkuat komunitas dan meningkatkan penilaian generasi muda terhadap keragaman sosial, budaya dan agama.
2. **Learning to know.** Belajar Mengetahui. Pilar ini mengidentifikasi pentingnya membantu generasi muda untuk 'belajar caranya belajar' bersama dengan pengetahuan disiplin terstruktur.
3. **Learning to do.** Belajar untuk melaksanakan. Fokus dari pilar ini adalah pada pentingnya mendukung generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dalam beragam keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk keberhasilan kerja, apa pun jenis pekerjaan yang mereka pilih.
4. **Learning to be.** Belajar untuk menjadi. Penekanan dalam pilar ini adalah pada pentingnya merangsang imajinasi dan kreativitas generasi muda melalui penyediaan peluang dan dorongan untuk melakukan penemuan estetis, artistik, ilmiah, budaya dan sosial dan untuk mengembangkan kepercayaan diri mereka dalam melakukan eksperimen untuk kesejahteraan umat manusia.

⁴UNICEF, 2014

⁵WHO 2003; Global Burden of Disease Study 2010, 2012

⁶Kim-Cohen dkk. 2003; Layard dan Hagell 2015

⁷Layard dan Hagell 2015

⁸OECD, 2014

Wellbeing dan Keterampilan Abad 21

Keempat pilar seperti yang telah dipaparkan sebelumnya sejalan dengan hasil dari riset internasional besar yang melibatkan sekelompok 250 peneliti di 60 institusi di seluruh dunia⁹. Sepuluh keterampilan utama untuk peserta didik berevolusi dari analisis kurikulum pendidikan internasional dan kerangka kerja penilaian. Kesepuluh keterampilan ini dibagi menjadi empat kategori besar:

1. **Ways of thinking (learning to know)**. Ditandai dengan kreativitas dan inovasi; kemampuan dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan; serta kemampuan untuk belajar bagaimana caranya belajar dan metakognisi.
2. **Ways of working (learning to do)**. Digambarkan dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kerjasama.
3. **Tools for working**. Individu dengan kemampuan ini mampu mengelola teknologi dan informasi, serta literasi informasi.
4. **Skills for living in the world (learning to live together)**. Ditandai dengan bagaimana individu memaknai dirinya sebagai bagian dari masyarakat lokal dan global (*citizenship-local and global*), serta kehidupan dan karirnya. Selain itu, individu juga memiliki kemampuan dalam menunjukkan tanggung jawab personal dan sosial, termasuk kesadaran kultural dan kompetensi.

Keterampilan kecakapan hidup pendidikan abad 21 untuk mencapai *wellbeing* ini mutlak disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan aspek-aspek yang melekat pada setiap tahapan tugas perkembangan individu secara universal, yaitu: fisik, kognitif, emosi, bahasa, sosial, konsep diri, etika dasar, dan moral.

Berdasarkan hasil pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara juga riset pendidikan karakter¹⁰, anak sampai usia 17 tahun adalah tanggung jawab orang dewasa. Oleh karena itu, kunci keberhasilan penanaman nilai karakter terletak pada keteladanan para pendidik di sekolah bersama dengan orangtua di rumah. Dalam konteks pendidikan karakter di sekolah, maka yang harus disasar terlebih dahulu adalah penguatan kapasitas kualitas mental para pendidik untuk mampu berkolaborasi menciptakan ekosistem lingkungan sekolah untuk mencapai kondisi *wellbeing*, yaitu faktor kunci yang berpengaruh terhadap keberhasilan siswa. *Wellbeing* sangat berperan dalam memaksimalkan pertumbuhan baik siswa dan pendidik, dimana sekolah merupakan sarana yang potensial dalam membentuk kepribadian individu karena siswa yang sehat, merasa bahagia dan sejahtera dalam mengikuti pelajaran di kelas, dapat belajar secara efektif dan memberi kontribusi positif pada sekolah dan lebih luas lagi pada komunitas¹¹.

⁹Griffin et al. 2012

¹⁰Lickona, 1991, Davidson, 2005

¹¹Konu & Rimpela, 2006.



Sebaliknya, meskipun program pendidikan karakter sudah dijalankan namun kondisi sekolahnya tidak menyenangkan, menekan, dan membosankan akan menjadi sumber stres yang signifikan dan menjadi *wellbeing* negatif karena siswa terserang rasa cemas sehingga mengurangi kualitas hidup bagi peserta didik¹².

Ketika siswa mengalami kejenuhan, ia akan merasa tidak memiliki hubungan sosial yang baik karena pemenuhan aktualisasi dirinya di sekolah terasa seperti diabaikan. Stres yang dialami oleh siswa akan memberikan dampak yang buruk pada hubungan interpersonal, membuat iklim belajar tidak menyenangkan dan berakibat pada kenakalan siswa yang bereaksi negatif karena stres, bosan, terasingkan, kesepian dan depresi¹³.

Dalam konteks pendidikan karakter, penguatan kapasitas mental pendidik sebagai *role model* untuk peserta didik dilakukan untuk memperkuat kompetensi sosial dan kepribadian guru sebagai amanat dari Permendikbud No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Selama ini pemerintah pusat baru menysasar pada kompetensi pedagogik dan profesional yang sifatnya lebih kepada peningkatan kapasitas kognitif dan belum memiliki fokus pada peningkatan kompetensi kepribadian dan sosial terlebih dalam konteks kurikulum pendidikan karakter.

Keterampilan yang perlu diajarkan pada pendidik adalah sebagai berikut: (1) Pendidik memiliki keterampilan mengevaluasi diri dan berefleksi merencanakan peningkatan kualitas diri untuk mencapai *wellbeing*, (2) Pendidik menyadari perannya sebagai *role model* karakter bagi siswa dan orang sekelilingnya dan mampu melakukan asesmen penilaian karakter, (3) Pendidik mampu membedakan komunikasi yang efektif dan tidak sesuai dengan etika yang berlaku, (4) Pendidik mampu berkolaborasi dalam keberagaman sehingga tumbuh sikap toleran terhadap perbedaan, (5) Pendidik memiliki keterampilan sebagai desainer perubahan perilaku untuk mengenali keunikan potensi siswa, (6) Pendidik mampu menerapkan prinsip coaching, (7) Pendidik mampu berkolaborasi merencanakan penerapan ekosistem lingkungan sekolah yang menghasilkan kondisi *wellbeing*.

REKOMENDASI

Wellbeing siswa merupakan persyarat tumbuhnya hasrat belajar, dan terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Sangat krusial menumbuhkan ekosistem lingkungan dunia pendidikan agar anak Indonesia bahagia dan sejahtera tetapi di sisi lain kerangka *wellbeing* siswa belum banyak terakomodasi di sistem pendidikan Indonesia yang masih menitikberatkan pada keberhasilan akademik. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan *wellbeing* siswa dalam sistem pendidikan Indonesia dengan baik, penting kiranya untuk membuat perencanaan dan kajian secara komprehensif, inkubasi bisa diterapkan bertahap secara terbatas di sekolah-sekolah percontohan, mengukur capaian dan membuat berbagai perbaikan, serta memperluas cakupan implementasi. Secara lebih spesifik, berikut aktivitas-aktivitas kunci yang direkomendasikan:

- **Merumuskan Kebijakan Pendidikan yang Berfokus pada *Wellbeing* Siswa.** Terwujudnya tujuan pendidikan yang berfokus pada *wellbeing* siswa dalam skala yang luas sangat memerlukan kebijakan nasional yang jelas. Perlu dirumuskan dengan melibatkan seluruh elemen stakeholder pemangku kepentingan. Dalam tataran praktis, kebijakan ini penting untuk dieksplisitkan dalam RPJMN, dan RENSTRA Kemdikbud. Pada gilirannya, sekolah perlu memiliki kewenangan dan diberikan kewenangan mandiri untuk menurunkan kebijakan nasional yang dimaksud menjadi kebijakan dan prosedur di level sekolah. Di tingkat sekolah, elemen siswa, orang tua, guru, dan pihak sekolah perlu berkolaborasi dalam proses penyusunan dan perbaikannya. Hal yang perlu

¹²Hueber & McCulloch, 2000

¹³Fatimah, 2010

ditekankan dalam proses penyusunan kebijakan ini ialah urgensi untuk mengeksplisitkan proses yang berjalan, tidak semata-mata mengejar hasil, dan memastikan siswa, orang tua, guru dan pihak sekolah menyadari keterkaitan proses yang berlangsung dengan kondisi dan realitas di lingkungan sekolah masing-masing. Pemahaman dan tujuan pendidikan yang berfokus pada *wellbeing* siswa penting dijadikan sebagai landasan tujuan bersama.

- Mengintegrasikan Kerangka Kerja *Wellbeing* Siswa dengan Kurikulum yang Berlaku.** Kerangka kerja *wellbeing* siswa sangat menekankan *whole-school approach*. Dengan demikian, usaha yang dikerjakan bukan hanya sempalan di mata pelajaran tertentu atau extra-kurikulum semata, melainkan menjiwai keseluruhan proses pembelajaran dan melibatkan seluruh ekosistem sekolah. Kurikulum yang berlaku di sistem pendidikan Indonesia seperti K-13 tetap merupakan acuan utama dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, tetapi mengacu kepada 10 keterampilan abad 21 berdasarkan kerangka *wellbeing* yang disarankan PBB, maka keempat pilar *wellbeing* siswa perlu dielaborasi ke dalam kurikulum yang berlaku: (1) *learning to live together*; (2) *learning to know*; (3) *learning to do*; dan (4) *learning to be*. Artian pilar dalam hal ini berarti keempat komponen yang dimaksud harus ada, tetapi target capaian dan pola implementasinya dapat bervariasi menyesuaikan keberagaman dengan konteks dan kebutuhan masing-masing sekolah.
- Mempersiapkan Tenaga Pendidik yang Memiliki Kompetensi dalam Menumbuhkan *Wellbeing* Siswa.** Guru beserta kepala sekolah memegang peranan kunci sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan *wellbeing* siswa di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan penumbuhan *wellbeing* siswa perlu diintegrasikan ke dalam sistem pengembangan profesional guru. Hal ini termasuk ke dalam semua jenjang, dan demikian pula untuk pre-service dan in-service guru serta sertifikasi guru.
- Monitoring dan Evaluasi.** Monitoring adalah untuk melihat sejauh mana lingkungan sekolah dapat mendukung tumbuhnya *wellbeing* siswa berdasarkan kebutuhan seluruh pihak untuk peduli. Evaluasi atau pengukuran yang dilakukan tidak semata-mata untuk siswa, melainkan dimaksudkan bagi seluruh ekosistem sekolah. Hal ini mengingatkan monitoring dan evaluasi dalam kerangka kerja *wellbeing* siswa merupakan proses yang terus berjalan dan usaha peningkatan secara bersama-sama oleh seluruh ekosistem sekolah. Secara lebih terperinci, kerangka monitoring dan evaluasi yang dirancang dimaksudkan untuk membantu sekolah dalam hal: (1) Mengukur faktor-faktor esensial yang berperan dalam menumbuhkan *wellbeing* seluruh ekosistem sekolah, terutama siswa; dan (2) Memberikan masukan dan perbaikan terhadap kebijakan, prosedur, program dan proses pembelajaran yang menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Sistem monitoring dan evaluasi beserta instrumen pengukuran perlu dikembangkan sejalan dengan rancangan kerangka kerja sekolah yang berfokus pada *wellbeing* siswa dan harus terintegrasi dengan struktur dan sistem sekolah.